

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Mengusung tema – tema negara di benua Eropa selalu menarik perhatian, baik dalam bidang ekonomi, budaya, teknologi maupun politiknya. Salah satu negara yang berada di benua Eropa tersebut adalah Spanyol.

Spanyol adalah negara ketiga terbesar di Eropa setelah Rusia dan Perancis, yang mempunyai wilayah seluas kurang lebih 504.750 kilometer persegi dan hampir berbentuk segi empat¹.

Kawasan Spanyol bukan saja penting dari segi geopolitik melainkan juga dari hubungannya dengan Maroko yang merupakan wilayah strategis Laut Tengah. Dan dari segi militer, Spanyol memiliki tentara yang mempunyai loyalitas tinggi dalam menjaga keberlangsungan keamanan dalam negeri dan kepentingannya dengan negara lain. Hal ini bisa dilihat dari signifikan historisnya membangkitkan kecurigaan dan kekecewaan mendalam pada tubuh angkatan bersenjata yang sangat meyakini peran mereka sebagai penjaga kesatuan teritorial dan tidak mau mengakui adanya perbedaan antara “otonomi regional” dengan “separatisme”.

Dari segi ekonomi sendiri Spanyol memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang bagus (pertumbuhan GDP pada tahun 2000 mencapai US \$ 520

milyar)² tidak kalah dengan negara-negara Eropa lainnya apalagi setelah adanya penyatuan mata uang tunggal bagi Eropa yakni euro, nilai euro juga memiliki nilai tukar yang tinggi. Kondisi ini didukung oleh hampir semua negara-negara Eropa menggunakan euro, meskipun baru sementara namun menguatnya euro memiliki prospek yang cerah. Dan bila dilihat dari pertumbuhan ekonominya, Spanyol bisa dimasukkan ke dalam kelompok negara terkaya di dunia.

Selain karena faktor di atas, penulis juga mempertimbangkan pentingnya peranan suatu partai politik dalam pengambilan kebijakan di suatu negara yang demokratis, termasuk Spanyol. Partai politik adalah elemen penting dalam struktur pemerintahan suatu negara. Partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik mempunyai fungsi utama yaitu mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Untuk itu partai politik menjalankan aktifitas yang penting yaitu harus mampu mengaitkan input menjadi output yang diinginkan masyarakatnya. Sedangkan pemilihan umum, yang selanjutnya akan sering penulis sebut dengan pemilu, merupakan wadah bagi partai-partai politik.

Di Spanyol terdapat beberapa partai besar yang bersaing secara sehat setiap empat tahun sekali pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Dua partai besar yang bersaing secara ketat untuk memperebutkan jumlah mayoritas suara adalah Popular Party (PP) dan The Spanish Socialist Workers Party (PSOE).

² *Ibid.*

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) pada pemilu di Spanyol tahun 2004.

Penulisan ini juga bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu indikator tingkat demokratisasi suatu negara. Melalui pemilihan umum, terjadi proses pergantian kekuasaan secara konstitusional di samping juga terdapat suksesi kepemimpinan politik dalam sistem politik negara yang bersangkutan. Saat ini Spanyol merupakan salah satu negara di kawasan Eropa yang telah menyelenggarakan pemilihan umum secara rutin setiap empat tahun sekali dan ini berarti mencerminkan kehidupan politik Spanyol yang bisa dikatakan telah mengalami proses yang demokratis.

Pemilihan umum juga merupakan wadah bagi partai-partai politik yang bertindak sebagai alat perwakilan dan sarana untuk pergantian pemerintahan. Jadi pemilihan umum dapat dikatakan sebagai alternatif terbaik untuk menentukan pemerintahan politik.

Sejarah Spanyol banyak diwarnai oleh berdirinya beberapa macam kerajaan sebelum ditaklukan oleh orang Islam pada awal abad ke-8. Sekelompok orang Kristen di utara Spanyol mulai mengambil kemenangan secara tiba-tiba, dan mencapai puncaknya pada penaklukan Granada pada tahun 1492, peristiwa ini melengkapi penyatuan beberapa kerajaan di Spanyol dan menjadi tonggak sejarah Spanyol³.

Di Spanyol terdapat beberapa partai besar yang bersaing secara sehat setiap empat tahun sekali pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Dua partai besar yang bersaing secara ketat memperebutkan jumlah mayoritas suara pada pemilihan umum di Spanyol tahun 2004 adalah Popular Party (PP) dan The Spanish Socialist Workers Party (PSOE).

The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) pertama kali memenangkan pemilu pada tahun 1936, tetapi perang sipil antara kaum Republik dan kaum Nasionalis telah menghancurkan kemenangan tersebut. Fransisco Franco Bahamonde dari kelompok Nasionalis kemudian menjadi seorang penguasa yang diktator setelah memenangkan perang tersebut sampai tahun 1975.

Juan Carlos de Borbon y Borbon mengambil alih kekuasaan dari tangan Franco. Pada tahun 1976 dia mengangkat Adolfo Suarez dari Partai Demokrat (UCD) sebagai perdana menteri. Tahun 1977 pemilu dimenangkan oleh UCD.

Sepanjang tahun 1980-an Spanyol mengalami suatu kebangkitan ekonomi. Di samping kenaikan ekonomi yang besar, isu sosial penting lainnya tidak diperhatikan. Akhir tahun 1980-an pengangguran meningkat dan inflasi tinggi telah mengakibatkan ketidakpuasan antar para pekerja Spanyol. Bahkan sepanjang tahun 1980-an Spanyol diganggu oleh serangan, antara lain oleh kekacauan. Serangan dilakukan oleh para guru, pegawai sipil, buruh tambang, petani, pelayanan kesehatan, karyawan pabrik, dan para pekerja galangan kapal. Suatu hari aksi mogok massal tahun 1988, yang pertama sejak 1934, telah menyatukan bangsa dan memenangkan dukungan 8 juta pekerja. Gonzalez menawarkan beberapa konsensi untuk mengakhiri serangan, termasuk meningkatkan dana pensiun dan meningkatkan asuransi pengangguran.

Pada awal 1990-an dukungan dari rakyat Spanyol untuk Gonzalez dan partainya merosot. Ketidakpuasan dengan peraturan The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) disebabkan beberapa hal, antara lain : para politisi dan tindak korupsi yang telah mencemari pemerintah, pengeluaran ekonomi yang meningkat dan jumlah pengangguran yang melewati angka 20 persen. Kepercayaan terhadap kepemimpinan ekonomi The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) menjadi lebih buruk lagi pada awal 1990 ketika suatu resesi dunia melanda Spanyol dan ekonomi menurun drastis.

Rasa kedaerahan dan kesukuan menjadi suatu sumber ketegangan sosial yang penting untuk pemerintah nasional. Separatis Basque (kelompok ETA) dicalahkan atas seratus lebih kematian warga Spanyol pada akhir

dan pertengahan 1990-an. Pemerintah The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) berjanji untuk memberantas teroris dan menangkap anggota ETA. Bagaimanapun, kelompok ETA tetap melakukan pengeboman di tempat-tempat umum dan melakukan penculikan. Pada tahun 1988 pemerintah dipermalukan oleh pernyataan tanpa bukti pejabat yang mendukung militer yang telah melakukan pembantaian anggota ETA di Spanyol selatan dan Perancis utara pada tahun 1980-an. Pada pertengahan tahun 1990-an suatu pergerakan damai yang muncul mengarahkan pendapat umum untuk melawan taktik kejam ETA, dan separatis kehilangan dukungan politiknya⁵.

The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) , memudar citranya karena adanya skandal, tingginya jumlah pengangguran, dan divisi internal yang tumbuh terhadap kebijakan partai, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam memperoleh suara mayoritas pada pemilihan umum tahun 1993. Gonzalez memulai tahun keempatnya sebagai perdana menteri dengan suatu pemerintahan minoritas. Untuk memperoleh dukungan atas kebijakan pemerintah, Gonzalez terpaksa mencari dukungan dari partai Catalan dan Basque. Partai Catalan (CiU's), merupakan partai regional yang agak besar, Gonzalez memanfaatkannya untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Pada tahun 1995, ada isu baru atas keterlibatan pemerintah atas pembunuhan separatis Basque, CiU's kemudian

⁵Walter D. D'haeseleer, *The Return Of Civil Society : The Emergence of Democratic Spain* (London :

menarik dukungannya terhadap pemerintah The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) dan memaksa pemilihan baru.

Namun akhirnya, The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) tumbang karena adanya skandal korupsi atas pemerintahannya yang terus berlanjut. Pada bulan Maret tahun 1996, pemilihan umum nasional di Spanyol dimenangkan oleh Popular Party (PP), yang dipimpin oleh Jose Maria Aznar, mengalahkan The Spanish Socialist Workers Party (PSOE). Tetapi Popular Party (PP) gagal untuk memperoleh kemenangan secara mutlak dan kemudian bergabung dengan Partai Nasional Catalan (CiU's) untuk membentuk pemerintahan koalisi. Dengan adanya dukungan dari CiU's, Perdana Menteri Jose Maria Aznar berkonsentrasi untuk penambahan kekuatan bagi pemerintahan regional Spanyol. Pada bulan November 1996 Spanyol bergabung dengan NATO (*North Agreement Territory Organization*).

Prioritas utama bagi pemerintahan Perdana Menteri Jose Maria Aznar adalah mengurangi defisit anggaran agar dapat mengadopsi nilai tukar Eropa secara umum (euro) pada tahun 1999. Penghematan diperkenalkan oleh pemerintah termasuk pemotongan subsidi dan pembiayaan pada sektor publik, hal ini menimbulkan meluasnya oposisi. Pemogokan oleh pelayan masyarakat, supir-supir truk, pekerja tambang dan yang lainnya telah menyebabkan kekacauan ekonomi yang cukup serius⁶. Meskipun Popular Party dibenci, tetapi

⁶ <http://www.scribd.com/doc/10021002/Spain-1992-1999>

untuk memberikan makna pada fenomena yang terjadi⁹. Teori mengembangkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang berhubungan atau berkorelasi. Untuk mengeksplanasikan permasalahan di atas penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1. Konsep Partai Politik

Secara umum fungsi partai dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mentransformasikan kepentingan dan tuntutan menjadi kebijaksanaan dan memperoleh kontrol terhadap alat-alat pemerintah agar dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

Robert Michels mendefinisikan partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik yang mempunyai fungsi utama yaitu mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan¹⁰. Untuk itu partai politik menjalankan aktifitas yang penting yaitu berpartisipasi di sektor pemerintahan, dalam artian berusaha mendudukkan orang-orang menjadi pejabat pemerintah. Dalam rangka mencapai hal tersebut partai politik harus mampu mengaitkan input yang berupa tuntutan dan dukungan masyarakat yang dinamis dengan kebijakan output partai secara tepat jika menghendaki mekanisme partai memberi hasil yang diharapkan. Karena itu dibutuhkan elit partai yang mampu mengkonversikan input tadi menjadi output partai seperti

⁹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES, 1983)

¹⁰ Robert Michels *Partai politik - Kenderungan Oligarkhis dan Birokrasi* (Jakarta : CV Rajawali)

program dan kebijakan-kebijakan partai. Bila kepemimpinan partai lemah, maka anggota-anggotanya akan cenderung memisahkan diri dan membentuk faksi yang saling berlawanan untuk berebut pengaruh¹¹.

Menurut Angus Campbell ada tiga variabel utama yang berpengaruh terhadap perilaku individu dalam memilih suatu partai politik. Ketiga variabel tersebut adalah :

a. Identifikasi terhadap partai

Secara psikologis individu memilih suatu partai politik karena adanya kesetiaan dan cintanya terhadap partai politik tersebut.

Praktek politik dari partai –partai di Spanyol terkadang berbeda dengan platform ataupun citra partai yang ditangkap masyarakat. Tetapi untuk sebagian masyarakat sering masih memiliki kesetiaan tradisional kepada suatu partai karena citra partai tersebut atau karena retorika para pemimpinnya. Kesetiaan terhadap suatu partai sering digoyahkan oleh kekecewaan dan ketidakpuasan para pendukungnya sehingga mereka mamindahkan pilihan dukungan. Pilihan-pilihan lebih dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan praktis dan pragmatis berupa kepentingan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kondisi-kondisi sosial seperti pendidikan, standar kehidupan, ekonomi

status sosial yang pada akhirnya mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran politik.

b. Isu yang berkembang

Dengan pertimbangan ini individu memilih partai yang mereka anggap layak dan sanggup untuk memimpin pemerintahan. Kelayakan itu ditentukan oleh isu yang sedang berkembang. Perkembangan ini selanjutnya menuntut partai untuk dapat tanggap dan mengetahui siapa dan bagaimana massa yang diharapkan jadi pendukungnya. Partai kemudian jadi lebih reformis dan representatif melalui kompromi sedikit demi sedikit terhadap ideologinya masing-masing sehingga partai kehilangan ciri khas ideologinya yang kemudian digantikan dengan lintas kelas-rasional-agama-etnis dan kepentingan¹².

c. Orientasi terhadap calon (kandidat)

Individu memilih partai politik tertentu karena kualitas personal kandidat, perilaku ini terbagi dalam dua bagian yaitu :

1. kualitas instrumental, dimana pemilih melihat kemampuan kandidat dalam menangani suatu masalah tertentu.
2. Kualitas simbolis, dimana pemilih mempunyai pandangan bagaimana seharusnya pemimpin yang baik seperti misalnya yang jujur, baik hati, sederhana dan sebagainya.

¹²Robert Michels, *Political Parties* (The Free Press of Glancoe, 1958) hal 304-305, dan Maurice Duverger, *Political Parties* (London: Muthuen, 1954) hal.17

Dalam sistem politik lebih dari satu partai agar dapat menguasai pemerintahan maka partai politik harus dapat memperoleh mayoritas kursi di parlemen. Partai-partai politik mempunyai daya tarik politik yang tidak sama dalam berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan pengalaman sosialnya yang khas dan latar belakang sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu, agar dapat menang dalam pemilihan umum, partai harus memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam hal kepanduan dan konsentrasi dari organisasinya. Kepanduan menentukan daya saing, yaitu menggunakan sumber daya dan memanfaatkan arena pertarungan seperti parlemen nasional, pemilihan umum, media massa dan massa pemilih serta kemampuan merumuskan tujuan-tujuan dan menentukan strategi-strategi¹³.

Senada dengan pergeseran ini, partai kemudian menjadi *catch-all party* atau partai yang tidak pandang bulu. *Catch-all* yang pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer, menunjuk pada suatu kondisi ketika partai berusaha merangkul sebanyak mungkin kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai anggotanya dengan cara menawarkan program-program serta keuntungan-keuntungan lainnya dengan tujuan utama yaitu memenangkan pemilihan umum¹⁴.

¹³Robert Dahl, dalam Miriam Budiarjo, ed., *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta : Gramedia, 1981) hal. 108 dan 131

¹⁴Otto Kirchheimer, *Transformasi Sistem-sistem Kepartaian Eropa Barat*, dalam Dr. Ikhlasul Amal ed., *Teori-teori Politik dan Pemerintahan* (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1996) hal. 7

Menurut Otto Kirchheimer, transformasi partai ideologis menjadi partai *catch-all* meliputi pengurangan secara drastis beban ideologi partai, penguatan kelompok pemimpin tertinggi dimana penilaian terhadap kebaikan, ataupun kelalaian mereka lebih didasarkan pada sumbangannya terhadap efisiensi sistem sosial secara keseluruhan daripada mengidentifikasi terhadap tujuan organisasi mereka masing-masing. Selain itu partai tidak lagi diletakkan pada suatu kelompok sosial tertentu, hal ini dimaksudkan agar dapat merekrut para pemilih dari berbagai kalangan. Partai juga mengamankan jalan masuk bagi kepentingan dengan maksud untuk memperoleh dukungan dalam pemerintahan melalui kelompok kepentingan.

Sementara itu mengapa masyarakat memilih suatu partai politik, menurut Mark N. Hagopian adalah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Motif ideologi partai tersebut.

Ideologi sebagai landasan perjuangan partai yang menentukan kualitas, arah gerak dan tujuan partai, memiliki peranan yang besar untuk menarik dan menghimpun dukungan rakyat. Terlepas apakah itu *Self Justification* dari elit partai ataukah *Mass Deception* oleh pimpinan partai, elite partai yang diideologikan tersebut mampu dijadikan

sebagai alat penarik pendukung untuk melawan dan mengalahkan saingan politiknya¹⁵.

2. Keuntungan yang mungkin diraih oleh suatu kelompok atas pilihannya.
3. Isu – isu yang berkembang pada saat itu (*Nature of Times*).
4. Tradisi individu dalam melakukan pemilihan (*No issue content*).

Tingginya partisipasi politik dalam masyarakat Spanyol yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk partisipasi politik, memberikan keuntungan terhadap partai politik. Melalui partisipasi politik tersebut, masyarakat Spanyol dapat berinteraksi secara langsung dengan partai politik, dengan cara pemberian suara, diskusi publik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan yang merupakan bagian dari partai politik, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Kondisi masyarakat Spanyol ini, memudahkan partai-partai politik dalam mensosialisasikan isu dan gagasan politik serta dalam menghimpun massa dan mencari dukungan.

¹⁵Peranan Ideologi sebagai kamufase atau murni dibahas dalam : Maurice Duverger : *Sosiologi Politik* teri Denial Dhabidna (Jakarta : Pajournal Press, 1985) hal 255-272

2. Teori Pemilih

Partisipasi politik memegang peranan penting dalam menentukan perilaku pemilih (*voting behaviour*) para pemilih dalam pemilihan umum¹⁶.

Ramlan Surbakti menggunakan lima pendekatan untuk memahami latar belakang perilaku tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan struktural. Pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu, permasalahan dan program yang ditonjolkan tiap partai.
- b. Pendekatan sosiologis. Menempatkan kegiatan memilih dalam kaitannya dengan konteks sosial, misalnya latar belakang demografi dan sosial ekonomi.
- c. Pendekatan ekologis. Hanya apabila suatu daerah pemilihan memiliki perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, kelompok masyarakat seperti buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu yang bertempat tinggal di unit teritorial.
- d. Pendekatan psikologi sosial. Konsep psikologi sosial yang digunakan pada pendekatan ini adalah identifikasi partai. Konsep ini berhubungan dengan persepsi pemilih atas partai-

partai yang ada atau karakteristik emosional pemilih pada partai-partai tertentu.

- e. Pendekatan pilihan Rasional. Didasarkan atas kalkulasi untung rugi yang menjadi pertimbangan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya berpengaruh pada hasil akhir, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada¹⁷.

Menurut **Downs** preferensi semata-mata merupakan hasil kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam tujuan jangka pendek partai, yaitu memenangkan pemilihan umum. Dalam modelnya ini, Downs menyebutkan beberapa asumsinya mengenai pemilih yaitu¹⁸ :

- a) Mereka memiliki pilihan mengenai tipe kebijaksanaan macam apa yang mereka inginkan dari pemerintah. Pilihan dari pemilih individual berkaitan erat dengan kepentingan mereka sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.
- b) Pilihan tersebut ditempatkan pada spektrum tunggal (spektrum kanan-kiri).
- c) Pemilih adalah rasional, akan tetapi mamiliki sedikit informasi mengenai hubungan antara pilihannya dan kebijakan yang

¹⁷*Ibid.*, hal. 145

¹⁸ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper and D

diusulkan oleh yang lain. Pilihannya, yaitu memilih partai yang memiliki kebijakan paling sesuai dengan kepentingan mereka.

Dalam hubungan antar pemilih dan partai, Downs mengungkapkan asumsinya sebagai berikut :

- a) Partai berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dalam pemilihan umum. Dalam model ini, partai diarahkan pada keinginan memperoleh suara sebanyak mungkin dalam pemilihan umum. Sebagai konsekuensinya mereka harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan permintaan dan keinginan dari pemilih daripada mengeluarkan program yang bertentangan dengan keinginan masyarakat.
- b) Spektrum ideologi partai bergerak naik turun yang disesuaikan dengan keinginan pemilih. Asumsi ini digunakan untuk mengakuai bahwa partai dipaksa oleh masa lalu dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang agar mereka lebih terlihat rasional di mata pemilih. Partai tidak bebas untuk mengadopsi suatu kebijakan yang menjadi pilihannya, anggota dan tradisi cenderung menentang perubahan yang radikal. Pada akhirnya kondisi ini membuat partai tersebut kehilangan pemilih.
- c) Partai menggunakan ideologi untuk memobilisasi massa. Isu politik menjadi sangat kompleks dan terdapat herb

mengatasinya. Pemilih memiliki sedikit sekali dorongan untuk mendapatkan isu dan kebijakan tersebut. Ideologi digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan guna memudahkan pemilih menentukan pilihannya. Bagi Downs, ideologi membuat pemilih semakin rasional dalam menentukan pilihannya. Jadi, ideologi ini di sini berfungsi sebagai alat untuk memudahkan para pemilih mengetahui bagaimana keinginan dan kepentingan mereka dapat terpenuhi oleh sebuah partai dalam pemilihan umum.

- d) Jumlah partai dalam sistem kepartaian ditentukan oleh distribusi suara sepanjang spektrum ideologi.

Dalam debat maupun kampanye, The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) selalu mengutamakan pentingnya perbaikan hubungan dengan negara-negara Eropa lainnya yang renggang, terutama setelah dukungan Perdana Menteri Spanyol, Jose Maria Aznar, terhadap agresi militer Amerika Serikat terhadap Irak.

Untuk kebijakan isu-isu internasional tentang terorisme dan tentang imigran gelap yang mengancam keamanan dalam negeri, The Spanish Socialist workers Party (PSOE) membuat program yang lebih mencerminkan keinginan masyarakat secara luas.

Dalam usahanya untuk memperoleh suara terbanyak, The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) juga membuat program-program yang paling

diperlukan oleh masyarakat Spanyol pada umumnya. Hal 1

dalam kampanyenya yang menjanjikan untuk segera menarik pasukan dari Irak apabila memenangkan pemilihan umum¹⁹.

Spanyol yang cenderung untuk memandang kepentingan etnis, bahasa, agama dan daerah sebagai kepentingan pokok yang mendorong terbentuknya berbagai jenis partai. Pola multi partai ini lebih mencerminkan keanekaragaman sosial, budaya dan politik, yang membawa akibat khusus dalam praktek kampanye untuk merebut kursi dalam parlemen. Partai-partai politik tersebut memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan politik masyarakat Spanyol untuk menggalang pengaruh serta untuk menghimpun massa atau dukungan.

F. Hipotesa

Kemenangan The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) pada pemilu di Spanyol tahun 2004 dipengaruhi oleh faktor kekecewaan para pemilih di Spanyol terhadap kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar, reformasi hukum pekerja dan pencabutan subsidi serta dukungan kepada Amerika Serikat untuk menginvasi Irak dari perdana menteri Jose Maria Aznar dari Popular Party (PP) dan faktor kepemimpinan dari Jose Luis Rodriguez Zapatero dari The Spanish Socialist Workers Party (PSOE).

¹⁹ <http://www.wsws.org>

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup agar dalam menganalisa permasalahan lebih tajam dan terfokus. Jangkauan waktu penelitian ini adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum di Spanyol tahun 2004. Namun juga tidak menutup kemungkinan penulis untuk menggunakan data – data dan informasi dari tahun – tahun sebelumnya.

H. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi bahan–bahan dokumen yang ada di perpustakaan dan internet. Oleh karena itu, data-data yang diolah adalah berupa data yang bersumber dari analisa data sekunder seperti buku – buku, majalah dan surat kabar maupun dokumen lainnya.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Dinamika Politik Spanyol yang akan menjelaskan tentang sistem politik, struktur pemerintahan, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum Spanyol dan sejarah kerangannya *The Spanish Socialist Workers*

BAB III Meningkatnya Dukungan kepada The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) Menjelang Pemilihan umum Nasional, yang akan menguraikan tentang kebijakan perdana menteri Jose Maria Aznar dari Popular Party (PP) dalam bidang ekonomi dan politik yang banyak menyebabkan kontroversi serta aksi The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) terhadap kebijakan tersebut yang banyak menuai simpati, serta gambaran situasi di Spanyol menjelang pemilihan umum nasional tahun 2004.

BAB IV menguraikan tentang kemenangan The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) dalam pemilihan umum Spanyol tahun 2004 yang membahas tentang kepemimpinan Jose Luis Rodriguez Zapatero dalam The Spanish Socialist Workers Party (PSOE) serta hasil perolehan suara masing-masing partai pada pemilihan umum nasional Spanyol tahun 2004.

BAB V berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya